

The Role of the Ministry of Religious Affairs in Facing the Challenges of Islamic Education in the Digital Age

Roidah Lina

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta
lienaroidah@gmail.com

Qiyadah Robbaniyah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta
qrobbaniyah@gmail.com

Diningrum Citraningsih

STAI Terpadu Yogyakarta
diningrum.citra@gmail.com

Ika Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta
cicit.efka@gmail.com

Received: May 29, 2023/ Accepted: July 10, 2023

Abstract

This study aims to determine the role of the Ministry of Religious Affairs in facing educational challenges in the digital era. Data was collected in DIY in 5 districts—descriptive qualitative research method with data collection of interviews, observations, and documentation. The result of this research is that the Ministry of Religious Affairs of the DIY region oversees Islamic educational institutions, both formal and non-formal. Each region's Ministry of Religious Affairs has a general and special program that accommodates the needs of each area—the development of the era in the era of digitalization. The Ministry of Religious Affairs develops educational applications to facilitate Islamic educational institutions' control, supervision, and evaluation. The applications used include E-management, electronic madrasah activity plan, and budget (ERKAM), madrasah digital report card (RDM), Geschool application, E-learning, electronic learning, Jogja Digital Madrasah". (SIMBA) Management Information Systems for Early Education Assistance and Islamic Boarding Schools, Education Management Information Systems (EMIS), etc. Obstacles in implementing the transition from online to digitalization include human resources, infrastructure, and new work culture.

Keywords: *The Role of the Ministry of Commerce, Challenges of Islamic Education, Alpha Generation*

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan¹. Peran pendidikan dalam lembaga pendidikan yakni untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, dengan adanya sekolah, maka setiap manusia mampu mengikuti proses penyambungan ilmu dari para ahli (guru). Dan juga yang memiliki tujuan mengenal akan Tuhan yaitu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* secara menyeluruh, mampu berinteraksi dengan dirinya sendiri (muhasabah diri), memiliki perilaku yang baik, menjaga kesopanan dalam berpenampilan, serta mempererat tali persaudaraan dengan seluruh umat manusia². Sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan, lembaga pendidikan sudah selayaknya memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)³

Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia⁴. Perkembangan era saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan saat ini, termasuk pendidikan Islam⁵. Globalisasi mewariskan rentetan perubahan besar pada tatanan dunia secara menyeluruh. Era ini ditandai dengan proses kehidupan mendunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transformasi dan komunikasi serta terjadinya lintas budaya. Perubahan yang dibawa oleh globalisasi ini juga dialami oleh dunia pendidikan dengan guru sebagai praktisinya⁶. Tidak terbantahkan bahwa teknologi telah mengubah dunia pendidikan secara drastis⁷. Oleh karena itu untuk menghadapi tersebut dibutuhkan terobosan-terobosan yang paten dalam upaya menghadapi tantangan yang akan ditimbulkan⁸.

Pemerintah mengatur lembaga-lembaga pendidikan Islam melalui kementerian agama yang diberada di setiap wilayah di seluruh Indonesia. Kementerian agama mempunyai peran baik secara langsung dan tidak langsung dalam memajukan pendidikan di wilayah masing-masing. DIY merupakan wilayah yang sangat di kenal sebagai kota pelajar dan memiliki sekolah maupun pesantren yan diakui oleh masyarakat. Dalam menghadapi tantangan pendidikan pada generasi sekarang yang sangat dekat dengan teknologi dan memiliki keunikan, Maka peneliti tertarik untuk mengali lebih dalam bagaimana peran kementerian agama dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

¹ Qiyadah Robbaniyah et al., "Studi Kasus Santriwati Halaqoh Khotm Islamic Center Bin Baz Dalam Memilih Jurusan Kuliah," *At Turops: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (June 23, 2022): 11–22, <https://doi.org/10.51468/JPI.V4I1.87>.

² Roidah Lina Qiyadah Robbaniyah, *MANAJEMAN PENDIDIKAN ISLAM* (yogyakarta: Zahir Publishing, 2023).

³ Dinda Eka Safitri Qiyadah Robbaniyah, Syaiful anam, "PENGELOLAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMASARAN (Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta)," *Jurnal Pendidikan Islam AT-Turops* 2, no. 2 (2020): 1–11.

⁴ Qiyadah Robbaniyah, Roidah Lina, and Adi Haironi, "Tahfidzul Quran Learning Innovation at Pesanteran Islamic Center Bin Baz Yogyakarta Al-Quran," *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 1, no. 1 (2023): 169–79.

⁵ Syaiful Anam Qiyadah Robbaniyah, "Islamic Boarding School Challenges for Alpha Generation Student," *International Journal of Technology and Education Research* 01, no. 01 (2023): 67–76.

⁶ Fitri Oviyanti, "Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan Di Era Global," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (March 22, 2016): 267–82, <https://doi.org/10.21580/NW.2013.7.2.562>.

⁷ Triyanto Triyanto, "Peluang Dan Tantangan Pendidikan Karakter Di Era Digital," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 2 (October 27, 2020): 175–84, <https://doi.org/10.21831/JC.V17I2.35476>.

⁸ Pristian Hadi Putra, "Tantangan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Society 5.0," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (December 31, 2019): 99–110, <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.458>.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu menarasikan dan mendiskripsikan temuan-temuan yang ada⁹. Penelitian ini dilakukan di kementerian agama di wilayah DIY dengan 5 kabupaten yaitu kabupaten Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul. Pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber di kementerian agama atau dilakukan secara online. Observasi dilakukan untuk melihat terkait peran dari kementerian agama terkait pendidikan Islam, dokumentasi untuk mengambil data baik secara langsung ataupun melalui media online seperti web kemenag ataupun berita-berita yang mendukung.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Kementerian Agama (Kemenag) di bidang pendidikan adalah mengatur, mengembangkan, dan mengawasi pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu tugas utamanya adalah membawahi lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Kemenag juga memiliki program umum dan khusus yang diakomodasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap wilayahnya. Namun, tantangan dalam pendidikan Islam di Indonesia masih cukup besar. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, terbatasnya akses terhadap sumber daya pembelajaran, serta keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana.

Generasi Alpha, yang terdiri dari anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025, merupakan generasi yang tumbuh dengan teknologi digital dan media sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan memperhatikan penggunaan media sosial dalam proses pembelajaran.

Seksi Pendidikan Madrasah di Kemenag bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengawasan lembaga pendidikan Islam formal, khususnya Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran di lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang benar. Sementara itu, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bertanggung jawab dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam non-formal, khususnya Diniyah dan Pondok Pesantren. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang benar dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam menghadapi tantangan dan memenuhi tugas-tugas mereka, Kemenag harus terus mengembangkan kebijakan dan program yang inovatif, mengupayakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta memperhatikan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, Kemenag juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman agar bisa memberikan pendidikan Islam yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

1. Kementerian Agama Wilayah Yogyakarta

Tugas Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Pendidikan a) Membina, mendampingi yang berkaitan dengan kompetensi masing-masing guru di Madrasah dan program-program dari Kementerian Agama, seperti moderasi beragama b) Memberikan kebijakan liburnya guru atau ASN yang ada di Madrasah c) Memberikan kebijakan

⁹ Qiyadah Robbaniyah and Roidah Lina, "Kontribusi Pemikiran Abu Nida' Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Di Indonesia," *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2022): 24–35.

kurikulum Pendidikan d) Memberikan kebijakan mengenai bantuan pembiayaan untuk Pendidikan Madrasah Negeri e) Memberikan kebijakan mengenai pembiayaan ASN yang bekerja di Madrasah Negeri f) Rencana kedepan Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk Pendidikan Madrasah sangat bergantung dengan kebijakan yang di atasnya dan secara internal Kementerian Agama berupaya untuk mempertahankan yang sudah maju.

Sekolah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Sekolah Formal Mencakup RA, MI, MTS, MA. Kurikulum yang diadakan oleh Kemertrian Agama Kota Yogyakarta Kurirkulum yang digunakan di Madrasah, secara keseluruhan masih menggunakan kurikulum 2013 akan tetapi pada pertengahan tahun 2022 diadakan kurikulum merdeka. Kementerian agama juga mengadakan kurikulum yang dinamakan dengan madrasah by lotting yang akan diselenggarakan pada tahun ajaran 2023/2024 mulai dari MI, MTS, dan MA Kurikulum yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing, seperti unggul dalam tahfidz, unggul dalam robotic, dan unggul dalam akademi.

Beberapa Madrasah sudah ada yang bisa mengakses penilaian akhir atau rapot melalui jejaring internet dan sudah tidak lagi memberikan rapot dengan bentuk fisik Perkembangan literasi digital, sejauh ini secara intensive Kementerian Agama bekerjasama dengan kominfo, terkait literasi digital, Kementerian Agama sifatnya mengadakan sosialisasi, menggerakkan madrasah untuk senantiasa untuk melek digital walaupun belum maksimal paling tidak sudah melakukan upaya

Strategi yang digunakan dalam menghadapi perubahan digital dalam mengembangkan madrasah a) Menyesuaikan dengan keadaan b) Mengapresiasi madrasah-madrasah yang sudah mengupdate perangkatnya, sember daya manusianya, pengetahuannya, mengenai digital tersebut. c) Mendorong madrasah yang belum melaksanakan, yang masih belum maksimal kami dorong untuk dimaksimalkan melalui kunjungan-kunjungan ke madrasah, melalui whatsapp grup, melalui komunikasi-komunikasi yang melibatkan pengawas-pengawas madrasah, dalam agenda-agenda tertentu. Mengenai kunjungan-kunjungan ke madrasah, biasanya dilakukan dalam waktu yang tentatif. Sejauh ini kunjungan dapat dilakukan jika ada undangan saja atau di beberapa agenda saja, seperti agenda PKKMM di madrasah negeri ada di bulan desember, untuk uji publik ada di bulan januari sampai mei, dan untuk tentatif yang lain ada di setiap saat. Daftar Lembaga Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta: a) Raudhatul Athfal (RA) :12 Lembaga b) Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 8 Lembaga c) Madrasah Tsanawiyah (MTS) : 7 Lembaga d) Madrasah Aliyah (MA) : 6 Lembaga

2. Kementerian Agama Wilayah Sleman

Seksi Pendidikan Madrasah & Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kementerian Agama Kabupaten Sleman memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Ditinjau dari potensi, kesiapan peserta didik menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama Kabupaten Sleman, dikarenakan banyak peserta didik yang berlatar belakang umum. Sehingga, untuk mengajarkan pendidikan Islam secara homogen dibutuhkan layanan yang berbeda di setiap jenjangnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Sleman memiliki program matrikulasi yaitu cara membaca Al-Qur'an dan pemberian materi-materi agama tertentu. Adapun untuk guru yang kompetisinya kurang diadakan berbagai bentuk diklat serta penguatan di dalam organisir profesi seperti: MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Kelompok Kerja Guru yang bertujuan untuk mengembangkan profesionalitas kerja dan untuk penguatan materi-materi agama yang mendukung dalam prosesnya. Pendidikan Islam di madrasah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 183 Tahun 2019 tentang

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Materi dalam PMA dimaksud wajib diberikan di semua madrasah, meliputi kerangka dasar, standar kompetensi lulusan dan standar isi.

Kaitannya dengan Era Generasi Alfa ini adalah dikarenakan Generasi Alfa adalah generasi pertama yang lahir di Era Digital yang sudah sangat akrab dengan teknologi digital, maka Menteri Agama telah menetapkan tujuh prioritas kerja Menteri Agama, salah satunya program prioritas kerja adalah Transformasi Digital. Dalam Transaksi Digital ini semua layanan didorong untuk menggunakan teknologi informasi. Layanan dimaksud meliputi pelayanan madrasah: E-manajemen, elektronik rencana kegiatan dan anggaran madrasah (ERKAM), raport digital madrasah (RDM), E-learning, termasuk di dalamnya pembelajaran secara elektronik, pembelajaran dimaksud juga meliputi pelajaran agama Islam. Berkaitan dengan RDM (Raport Digital Madrasah) merupakan sistem yang dibuat oleh madrasah yang bertujuan untuk memudahkan ustadz- ustadzah mengedit raport santri dan memudahkan wali santri untuk mendownload file raport peserta didik¹⁰.

Oleh karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Sleman juga melaksanakan program tersebut melalui berbagai layanan elektronik, di antaranya: 1) Pembelajaran elektronik menggunakan aplikasi Geschool. 2. Raport digital madrasah agar program-program tersebut sampai ke madrasah-madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Sleman mensosialisasikan program-program yang ada melalui jalur birokrasi yang ada yaitu: (1) Melalui Kelompok Kerja Kepala Madrasah, (2) Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran, (3) Melalui Kelompok Kerja Guru, (4) Melalui Operator Madrasah, (5) Melalui Media Sosial seperti grup WA dan lain-lain. Kurikulum yang pada umumnya digunakan madrasah untuk menyesuaikan Generasi Alfa ini adalah kurikulum 2013. Adapun kurikulum merdeka sedang pada tahap proyek, dikarenakan masa efektif kurikulum berlaku 10 tahun. Sehingga, perkiraan masa efektif untuk kurikulum 2013 adalah di tahun 2023.

Penelitian tentang pelayanan elektronik di wilayah Kementrian Agama juga dilakukan oleh Dwi Puspita Sari dan Sri Sudiarti yang menjelaskan bahwa divisi humas melakukan kerjasama dalam bentuk bersinergi/bermitra dengan masyarakat dan media baik media cetak, media elektronik, dan media online, serta lembaga pers lainnya dalam membantu pihak Kanwil Kemenag Sumut untuk menyebar luaskan informasi keagamaan kepada masyarakat. Hal ini pun terlihat dari bagian dari divisi humas dibagi menjadi dua sub-bagian yaitu yang berfokus pada data dan informasi fokus pada media cetak dan media elektronik seperti twitter, instagram, facebook, dan youtube¹¹.

Adapun Pendidikan Islam di pesantren-pesantren maupun di Lembaga non formal lainnya seperti TPA, maka diserahkan kepada Lembaga masing-masing. Sedangkan Kementerian Agama Kabupaten Sleman hanya memberikan izin dan memantau program yang dibuat oleh Lembaga tersebut. Tentunya, dari adanya program-program tersebut diharapkan Pendidikan Islam dapat berkembang lebih baik dari tahun ke tahun. Perkembangan madrasah di Kabupaten Sleman 5 tahun terakhir mengalami kemajuan yang luar biasa. Dimana, saat ini madrasah sudah menjadi destinasi Pendidikan dan peserta didik sudah tidak merasa malu bahkan dengan bangga mengakui bahwa mereka siswa/I

¹⁰ Danang Dwi Prasetyo et al., "Application of Education Management Information System in the Online Learning Process in Madrasah," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 1 (January 27, 2023): 423–32, <https://doi.org/10.35445/ALISHLAH.V15I1.2863>.

¹¹ Dwi Puspita Sari and Sri Sudiarti, "PERAN HUMAS DALAM PENGOLAHAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA," *ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN* 5, no. 3 (2021): 158–69, <https://www.ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus/article/view/118>.

madrasah. Mereka juga banyak meraih prestasi yang luar biasa, seperti: prestasi ilmu agama islam, prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, prestasi robotik, prestasi penelitian, prestasi olahraga dan seni, serta prestasi di bidang Bahasa.

3. Kementerian Agama Wilayah Bantul

Madrasah khususnya di Kabupaten Bantul madrasah dibagi menjadi 3 bagian yaitu, RA/TK, MI/SD, MTS/SMP, dan MA/SMA. Madrasah dibagi menjadi dua yaitu Madrasah Negeri dan Madrasah Non Negeri (Swasta). Di Bantul Madrasah Negeri dipresentasikan 10% dan Madrasah Non Negeri 90%. Madrasah di Kabupaten Bantul berbasis kemasyarakatan. Madrasah Swasta terdapat sejumlah 141 sekolah dari jenjang RA sampai MA, dan untuk Madrasah Negeri terdapat sejumlah 16 sekolah.

Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk mendukung perkembangan pendidikan Islam di Era Digital membuat program-program seperti aplikasi yang bernama “Jogja Madrasah Digital” sebuah aplikasi terpadu program digitalisasi madrasah yang telah dirumuskan oleh Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenag DIY). Aplikasi ini diselenggarakan untuk mendukung salah satu prioritas program Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu transformasi digital. Aplikasi ini harapannya menjadi kebanggaan Bidang Penmad dan secara umum seluruh insan Kemenag DIY sebagai aplikasi lengkap dan berciri khas Yogyakarta. Platform ini sudah ada dari awal tahun 2022. Tentunya dalam melaksanakan program-program tersebut memiliki hambatan-hambatan, salah satunya adalah sarana dan pra sarana, karena tidak semua madrasah memiliki kemampuan yang sama untuk mendukung program digitalisasi ini, tidak semua murid-murid di madrasah memiliki handphone. Akan tetapi untuk Madrasah Negeri yang dibawah naungan kementerian agama sudah menerapkan platform ini dan difasilitasi sarana dan pra sarananya. Persentase keberhasilan platform dalam setahun 90%. Dan hambatan-hambatan yang ada kembali ke madrasahnyanya masing-masing dalam mencari solusi, kementerian agama hanya sebagai wadah untuk mengembangkan pendidikan Islam.

Pondok pesantren khususnya di Kabupaten Bantul berjumlah 113 yang sudah terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selain kementerian agama membangun sekolah formal, kementerian agama membangun pendidikan informal yang bernama “Pendidikan Kesetaraan Salafiyah”. Dan ada juga pondok pesantren yang hanya memberikan materi ke pesantrenan, tidak ada pendidikan formalnya. Selain itu, pondok pesantren beragam bentuknya seperti, ada yang pondok pesantren didalamnya ada madrasah nya dari jenjang MI, MTS, MA dan institut, ada juga yang menekankan di bidang Tahfidzhul Qur’an, dan boarding school. Kementerian Agama juga menaungi pendidikan non formal yaitu “Madrasah Takmiliah” yang berjumlah 123. Madrasah Takmiliah ada yang sudah termasuk didalam pesantren ada juga yang diluar pesantren, dan sudah dibangun dari tahun 2014. Madrasah ini sebagai penyempurnaan seperti sekolah agama yang dilakukan sore hingga malam. Madrasah Takmiliah tidak harus bertempat tinggal, untuk pembelajarannya bisa dilakukan dimana saja seperti, masjid namun di bentuk seperti di kelas dan tentunya madrasah ini ketika kelulusan mendapatkan ijazah. Terdapat ujian nasional dan mendapatkan raport di setiap semester. Madrasah takmiliah mempelajari materi fiqih, akidah, bahasa arab, dan hadis. Dilakukan 1 minggu 18 jam pelajaran. Kementerian Agama di Kabupaten Bantul menaungi pondok pesantren berjumlah 113, madrasah takmiliah berjumlah 123, lembaga pendidikan AlQur’an berjumlah 1.054 yang terdiri dari Taman Pendidikan Qur’n (TPQ), PAUD, dan rumah tahfidz.

Program-program yang dimiliki kementerian agama ialah pertama, setiap tahunnya diadakan monitoring di pondok pesantren untuk mengetahui perkembangan pesantren,

kedua pembinaan ke pondok pesantren mengundang perwakilan pondok pesantren dalam rangka merupakan program dari pemerintah. Program pendidikan dari kementerian agama dengan adanya undang-undang pesantren sebuah pedoman kegiatan pendidikan dan sebagai acuan pondok pesantren. Dalam kurikulum, kementerian agama mempunyai sebuah mitra yang bernama forum komunikasi pondok pesantren di Kabupaten Bantul untuk bersama-sama membahas kesesuaian kurikulum yang ada di pondok pesantren. Kurikulum pesantren sudah ada didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Didalam undang-undang pesantren terdapat kurikulum kajian kitab kuning, Aqidah, dan Akhlak. Syarat pengajuan kurikulum yaitu pondok pesantren memiliki 15 santri, ada tempat ibadah, asrama, pengasuhnya muqim (kyai atau ustadz), mendapatkan rekomendasi dari KUA, status tanah nya milik wakaf, hibah, atau milik pribadi, dan tidak boleh bersifat sewa.

Penelitian yang dilakukan oleh Manan¹² mampu menguatkan tentang manajemen pesantren di era digital, yang mana dijelaskan bahwa literasi digital diterapkan dalam sistem manajemen pesantren dan proses pembelajaran diruang kelas. Sistem informasi pesantren atau sistem manajemen pesantren berbasis ICT di era digital menjadi keharusan untuk digunakan oleh pesantren yang berorientasi pada layanan pendidikan baik kepada orangtua maupun peserta didiknya. Sistem manajemen pesantren akan membantu pengelolaan administrasi dan sumber daya di pesantren mulai informasi dan sistem penerimaan, menjalankan aktivitas belajar mengajar, sampai santri menyelesaikan masa belajar mereka kesemuanya terekam dengan rapi didalam sistem manajemen pesantren yang berbasis teknologi.

Di era digital, kementerian agama membuat sebuah aplikasi yang bernama “Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (SIMBA)” sebagai upaya pemerintah dalam afirmasi dan fasilitas terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. Emis (Education Management Information System) adalah sistem informasi manajemen pendidikan yang memuat data pondok kelembagaan, data santri, ustadz, dan sarana prasarana. Pondok pesantren yang sudah menggunakan data EMIS baru 50-60%, semua pondok pesantren harus mengakses data EMIS walaupun pondok pesantren sudah berjalan. EMIS adalah salah satu sistem informasi manajemen pendidikan yang didalamnya berisis informasi data-data pendidikan untuk disimpan, dikelola, dianalisis, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pendidikan. Dalam wilayah Kementerian Agama juga sudah dibentuk EMIS yang merupakan pengelola sistem informasi manajemen pendidikan¹³.

Fasilitas pemerintah juga tidak bisa, apabila tidak mengakses data EMIS, karena fasilitas dari pemerintah ke kementerian agama menggunakan aplikasi SIMBA, yang hanya bisa mendapatkan bantuan adalah yang sudah melakukan update data EMIS. Usaha yang dilakukan oleh kementerian agama adalah memberikan edukasi kepada pesantren dan melakukan komunikasi secara personal. Aplikasi SIMBA milik kementerian agama pusat untuk memfasilitasi lembaga pendidikan pesantren, dan yang sudah menggunakan aplikasi ini masih dibawa 50%. Sumber bisa diaksesnya aplikasi ini adalah data EMIS. Dimana data EMIS ini terkait dengan profile lembaga, data pimpinan, data pribadi, data pengajar, data santri, data sarana prasarana. Keuntungan aplikasi SIMBA bentuk fasilitas

¹² Muhamad Abdul Manan, “Daya Tahan Dan Eksistensi Pesantren Di Era 4.0,” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 3, no. 2 (April 24, 2019): 155–67, <https://doi.org/10.35316/JPII.V3I2.135>.

¹³ Dewi Nur Annisa Aliyan and Abdulloh Hamid, “Implementasi Pengelolaan Education Management Information System (EMIS) Di Madrasah Diniyah Takmiliah Al Hidayah Mojokerto,” *Jurnal Ilmiah Iqra'* 15, no. 2 (December 26, 2021): 174–86, <https://doi.org/10.30984/JII.V15I2.1533>.

pemerintah, mengajukan dana kementerian agama wilayah, dan lembaga bisa melacak pengajuan proposal yang dilakukan. Kendalanya di era digital ini adalah di era transisi yang dulu offline menjadi online. Dimana sumber daya manusia harus melek akan tentang IT, akan tetapi tidak semua pondok pesantren sudah melek akan hal ini. Kemudian, adanya keterbatasan anggaran, maka solusinya adalah pembinaan dilakukan secara bergantian.

4. Kementerian Agama Wilayah Gunung Kidul

Program-program yang ditetapkan oleh kementerian agama untuk setiap jenjang pendidikan tidak jauh berbeda, kecuali dalam hal materi pembelajaran antara pembelajaran pesantren dan madrasah sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila sumber daya manusia (SDM) memadai, sarana dan prasarana terpenuhi serta adanya dukungan masyarakat. Adapun target pencapaian kompetensi siswa yakni tercapainya tugas-tugas perkembangan secara optimal sesuai dengan standar yang dirumuskan. Aspek-aspek perkembangan yang dirumuskan meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni. Untuk mengotimalkan peran kementerian agama dalam aspek pendidikan Islam dapat dilakukan dengan proses pengawasan dari unsur pimpinan yang berwenang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati¹⁴ menjelaskan tentang keberhasilan Pendidikan Agama Islam di Indonesia maka sangat penting para pengawas PAI untuk memahami dan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengawas PAI yaitu menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan serta membimbing dan melatih profesional guru PAI. Sedangkan fungsi pengawas PAI yang harus dipahami dan dicermati adalah penyusunan program pengawasan PAI, pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI, pemantauan penerapan standar nasional PAI, penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan tugas kepengawasan

5. Kementerian Agama Wilayah Kulon Progo

Kementerian Agama Kulon Progo memiliki 2 seksi yang menangani bidang pendidikan, yaitu Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (Pakis) dan Seksi Pendidikan Madrasah (Dikmad). Dari 2 seksi tersebut ada beberapa peran, fungsi dan tugas dengan sasaran Generasi Alfa (generasi yang lahir tahun 2011-2025) atau saat ini usia 0-11 tahun. Apabila ditinjau dari jenjang pendidikan formal maka Generasi Alfa adalah anak-anak yang saat ini menduduki jenjang pendidikan RA sampai MI kelas 5. Kementerian Agama melalui Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (Pakis) bertugas membina dan memajukan guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Di antara guru-guru tersebut adalah guru PAI SD sebanyak 312 guru PAI, dengan status PNS sebanyak 177 guru PAI. Guru-guru ini menjadi sasaran pembinaan Kemenag. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (Pakis) telah melakukan upaya mengembangkan guru-guru PAI, seperti workshop, pengembangan kurikulum, mengarahkan administrasi dan Modul Ajar agar menjadi berbasis digital, dan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru. Pembinaan guru PAI ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan bagi Generasi Alfa.

¹⁴ Sumiyati, "PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL: STUDI DI KEMENAG KOTA SURAKARTA," *Mamba'ul 'Ulum* 18, no. 1 (March 29, 2022): 89–99, <https://doi.org/10.54090/MU.61>.

Kementrian Agama melalui Seksi Pendidikan Madrasah (Dikmad) bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang Pendidikan formal (RA, MI) dan non formal TPA, Madin, dan pondok pesantren di mana pada lembaga-lembaga tersebut banyak anak-anak usia Generasi Alfa. Seksi Pendidikan Madrasah juga bertugas menargetkan kualifikasi siswa berupa Lulusan MI harus bisa khatam tilawah 30 Juz. Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo memiliki prioritas program bagi lembaga pendidikan Islam berupa : Penguatan moderasi beragama bagi guru, tenaga 13 kependidikan, ustadz dan siswa/santri dan Kemandirian pesantren. Program tersebut telah dilaksanakan dengan melakukan pembinaan moderasi kepada perwakilan guru, santri/siswa serta sosialisasi lewat media sosial (zoom, web, dan lainnya). Tentu program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pendidikan Generasi Alfa. Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu bukti nyata bahwa masyarakat daerah tersebut percaya dan butuh terhadap pendidikan Islam.

Disamping itu, pengembangan budaya organisasi dari aspek sumber daya pegawai pada Kementerian Agama difokuskan pada agenda membangun kemampuan kepemimpinan (managerial agenda), kemampuan intelektual (intellectual agenda), dan perhatian pada pendidikan karakter. Hal ini dipahami karena pengembangan SDM pegawai merupakan salah satu kebijakan untuk membentuk sebuah sistem birokrasi yang efektif dan efisien, tanggap dan cekatan (quick and responsive), terbuka dan bertanggung jawab, membuka seluas mungkin partisipasi masyarakat, serta memiliki kinerja yang tinggi dalam bidang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat¹⁵.

Kesimpulan

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran penting dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi pendidikan Islam di Indonesia, baik lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Namun, Kemenag juga menghadapi tantangan dalam menghadapi era digitalisasi dan generasi Alpha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemenag perlu mengembangkan kebijakan dan program inovatif, mengupayakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta memperhatikan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Kemenag juga perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan zaman agar bisa memberikan pendidikan Islam yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Referensi

- Aliyan, Dewi Nur Annisa, and Abdulloh Hamid. "Implementasi Pengelolaan Education Management Information System (EMIS) Di Madrasah Diniyah Takmiliah Al Hidayah Mojokerto." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 15, no. 2 (December 26, 2021): 174–86. <https://doi.org/10.30984/JII.V15I2.1533>.
- Kusasi, Muhammad. "Pengaruh Budaya Organisasi, Efikasi Diri, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim." *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (December 15, 2012): 102–17. <https://doi.org/10.30872/PSIKOSTUDIA.V1I2.2197>.

¹⁵ Muhammad Kusasi, "Pengaruh Budaya Organisasi, Efikasi Diri, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim," *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (December 15, 2012): 102–17, <https://doi.org/10.30872/PSIKOSTUDIA.V1I2.2197>.

- Manan, Muhamad Abdul. "Daya Tahan Dan Eksistensi Pesantren Di Era 4.0." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 3, no. 2 (April 24, 2019): 155–67. <https://doi.org/10.35316/JPII.V3I2.135>.
- Oviyanti, Fitri. "Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan Di Era Global." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (March 22, 2016): 267–82. <https://doi.org/10.21580/NW.2013.7.2.562>.
- Prasetyo, Danang Dwi, Annisa Himmatul Ilya, Syarif Hidayat, and Diningrum Citraningsih. "Application of Education Management Information System in the Online Learning Process in Madrasah." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 1 (January 27, 2023): 423–32. <https://doi.org/10.35445/ALISHLAH.V15I1.2863>.
- Putra, Pristian Hadi. "Tantangan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Society 5.0." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (December 31, 2019): 99–110. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.458>.
- Qiyadah Robbaniyah, Syaiful anam, Dinda Eka Safitri. "PENGELOLAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMASARAN (Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta)." *Jurnal Pendidikan Islam AT-Turots* 2, no. 2 (2020): 1–11.
- Qiyadah Robbaniyah, Roidah Lina. *MANAJEMAN PENDIDIKAN ISLAM*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023.
- Qiyadah Robbaniyah, Syaiful Anam. "Islamic Boarding School Challenges for Alpha Generation Student." *International Journal of Technology and Education Research* 01, no. 01 (2023): 67–76.
- Robbaniyah, Qiyadah, and Roidah Lina. "Kontribusi Pemikiran Abu Nida` Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Di Indonesia." *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipiner* 2, no. 1 (2022): 24–35.
- Robbaniyah, Qiyadah, Roidah Lina, Amelia Falensyana, and Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. "Studi Kasus Santriwati Halaqoh Khotm Islamic Center Bin Baz Dalam Memilih Jurusan Kuliah." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (June 23, 2022): 11–22. <https://doi.org/10.51468/JPI.V4I1.87>.
- Robbaniyah, Qiyadah, Roidah Lina, and Adi Haironi. "Tahfidzul Quran Learning Innovation at Pesanteran Islamic Center Bin Baz Yogyakarta Al-Quran." *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 1, no. 1 (2023): 169–79.
- Sari, Dwi Puspita, and Sri Sudiarti. "PERAN HUMAS DALAM PENGOLAHAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA." *ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN* 5, no. 3 (2021): 158–69. <https://www.ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus/article/view/118>.
- Sumiyati. "PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL: STUDI DI KEMENAG KOTA SURAKARTA." *Mamba'ul 'Ulum* 18, no. 1 (March 29, 2022): 89–99. <https://doi.org/10.54090/MU.61>.
- Triyanto, Triyanto. "Peluang Dan Tantangan Pendidikan Karakter Di Era Digital." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 2 (October 27, 2020): 175–84. <https://doi.org/10.21831/JC.V17I2.35476>.